

PEMIKIRAN AL-GHAZALI TENTANG KEPALA NEGARA



SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)

Ilmu Politik Islam

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K U-2010 010 PI	No. REG : U-2010/PI/010 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

ROBIATUL ADHAWIYAH
NIM. E04205016

**FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN PRODI POLITIK ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2010**

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI



Skripsi oleh **Robiatul Adhawiyah** ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 10 Agustus 2010

Mengesahkan,

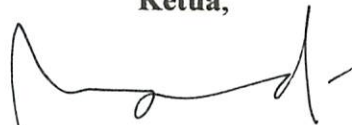
Fakultas Ushuluddin, Prodi Politik Islam
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



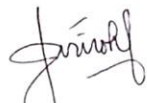
Dr. H. Ma'sum, M.Ag
NIP. 196609141989031001

Ketua,



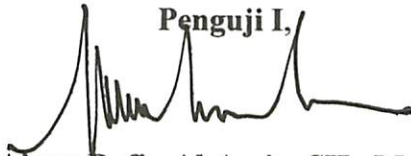
Drs. Slamet Muliono R, M.Si
NIP. 196811291996031003

Sekretaris,




Laili Bariroh, M.Si
NIP. 1977110320099122002

Penguji I,



Ainur Rofiq Al-Amin, SH., M.Ag
NIP. 197206252005011007

Penguji II,



Wiwik Setiyani, M.Ag
NIP. 197112071997032003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan penelitian.....	7
E. Penegasan Judul	8
F. Telaah Pustaka	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II: WACANA TENTANG KEPALA NEGARA.....	18
A. Kepemimpinan Negara	18
B. Syarat Kepala Negara	22

Secara historis, perbincangan tentang kepala negara dapat dilihat dalam sejarah Islam awal, yaitu setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dimana pada masa itu, masalah politik Islam yang paling mengemuka dan menonjol adalah konsep kepemimpinan. Sehingga sering dibahas para ulama. Ini tidak lepas dari karakter masyarakat Islam yang meletakkan peran kepala negara begitu sentral dan menentukan.

Peristiwa yang terjadi di Tsaqifah Bani Saidah sebagai pelaksanaan Syura yang pertama dilakukan oleh umat Islam sejak Nabi Muhammad wafat dan peristiwa Tahkim antara Ali dan Muawiyah menjadi titik awal munculnya perbincangan tentang kepemimpinan.¹ Sedangkan sarjana Islam pertama yang menuangkan gagasan atau teori politik dalam sebuah karya monumental adalah dimulai pada Abad ke 2 Hijriyah muncul sosok Ibnu Abi Rabi (w. 842M), pada abad ke 4 Hijriyah ada al-Farabi (w.339 H/950 M), abad ke 5 Hijriyah muncul al-Ghazali (w.505H/1111M) dan pada abad ke 6 Hijriyah Ibnu Khaldun (w.808H/1406), dan seterusnya hingga zaman modern saat ini. Perlu dicatat bahwa yang menjadi perhatian mereka semua terkait dengan prinsip politik (*siyasah*) adalah tentang kepala negara.

Terkait dengan kepala negara, Ibnu Abi Rabi' mengatakan bahwa setelah lahir kota atau negara maka timbul masalah tentang siapa otak pengelola negara itu, yang memimpinnya, mengurus segala permasalahan rakyatnya. Hal ini

¹J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 212.



disebabkan karena tidak mungkin suatu negara berdiri tanpa penguasa. kepala atau pengelola yang melindungi warga-warganya dari gangguan dan bahaya yang timbul diantara mereka sendiri atau yang datang dari luar.² Dan tentang siapa yang berhak menjadi kepala negara dia mengemukakan enam syarat yang harus dimiliki oleh seseorang untuk dapat menjadi kepala negara dan syarat-syaratnya adalah; (1) Harus anggota dari keluarga Raja, dan mempunyai hubungan dengan nasab yang dekat dengan raja sebelumnya; (2) Aspirasi yang luhur; (3) Pandangan yang mantab dan kokoh; (4) Ketahanan dalam menghadapi kesukaran atau tantangan; (5) Kekayaan yang besar; (6) Pembantu-pembantu yang setia.³

Sedangkan menurut Farabi bahwa penghuni negara itu terbagi dalam banyak kelas. Farabi berpendapat bahwa tidak semua warga negara mampu dan menjadi kepala negara. Yang dapat dan boleh menjadi kepala negara utama hanyalah anggota masyarakat atau manusia yang paling sempurna. Kepala bagi negara yang utama itu haruslah seorang pemimpin yang arif dan bijaksana, yang memiliki dua kelas kualitas luhur yang sebagian telah ada pada kepala negara itu sewaktu lahir sebagai watak yang alami atau Tabiat yang Fitri. Adapun dua belas kualitas yang luhur adalah; (1) Lengkap anggota badannya; (2) Baik daya pemahamannya; (3) Tinggi intelektualitasnya; (4) Pandai mengemukakan pendapatnya dan mudah dimengerti uraiannya; (5) Pencinta pendidikan dan gemar mengajar; (6) Tidak loba atau rakus dalam hal makanan, minuman dan

²Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1990), 46.

³*Ibid.*, 48.

Yang menarik, di samping al-Ghazali menjelaskan kewajiban mengangkat seorang kepala negara, syarat sekaligus tugas dia juga memaparkan metode untuk memperbaiki pemerintahan seorang kepala negara. Metode tersebut yaitu melalui kritik langsung kepada kepala negara melalui metode menulis surat kepada pemimpin dan wakil masyarakat lainnya.

Lebih jauh lagi, dalam skripsi ini akan dibahas lebih mendalam mengenai buah pemikiran al-Ghazali tentang kepala negara. Tema ini menjadi menarik karena al-Ghazali sendiri memiliki konsep kepemimpinan sendiri yang besar kemungkinan berbeda dengan konsep yang diutarakan oleh yang lain. Di samping juga, untuk menegaskan bahwa al-Ghazali bukan hanya sosok pemikir dalam dunia tasawuf dan filsafat sebagaimana difahami oleh mayoritas masyarakat tapi juga sebagai pemikir politik Islam klasik yang memiliki konsep sendiri.

Sebagai pelengkap, dalam skripsi ini juga akan sedikit dibahas pandangan kaum cendekiawan terhadap pemikiran al-Ghazali, khususnya terkait dengan tema sentral skripsi ini, kepala negara. Apakah pemikiran al-Ghazali bisa memberikan sumbangan pemikiran kepada para cendekiawan? Atau hanya sedikit para cendekiawan yang membahas tentang pemikiran al-Ghazali terutama tentang masalah kepala negara. Maka berdasarkan penjelasan diatas penulis akan menelaah lebih lanjut penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka penulis akan menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan al-Ghazali tentang kepala negara?
2. Bagaimana pandangan kaum cendekiawan terhadap pemikiran al-Ghazali tentang kepala negara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami bagaimana pandangan al-Ghazali tentang kepala negara.
2. Untuk memahami bagaimana pandangan kaum cendekiawan terhadap pemikiran al-Ghazali tentang kepala negara.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan ilmiah
 - a. Mendapatkan data dan fakta mengenai pandangan al-Ghazali tentang kepala negara.
 - b. Memberikan kontribusi wacana bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, utamanya politik Islam dan khususnya tentang kepala negara.

2. Kegunaan praktis

- a. Menjadi referensi di Perpustakaan Fakultas Ushuludin, Institut Agama Islam Negeri, Sunan Ampel Surabaya.
- b. Wacana konsep kepala negara menurut al-Ghazali bisa dijadikan sebagai bahan untuk praktek bernegara.

E. Penegasan Judul

Dalam skripsi ini, penulis ingin menegaskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam istilah, agar dapat mengetahui batasan masalah tersebut, untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut;

Pemikiran : Cara atau hasil berfikir.⁹

Al-Ghazali : Abu Hamid bin Muhammad Ibnu Ahmad al-Ghazali dilahirkan pada Tahun 450 H/ 1058 M di Thus Republik Islam Iran.¹⁰

Kepala : Orang yang mengepalai, orang yang berkuasa, orang yang menguasai wilayah atau amir.¹¹

Negara : Suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.¹²

⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 175.

¹⁰Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 155.

¹¹Teguh Wibawa dan Suyoto, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Anugerah, t.t.), 186.

¹²Umaruddin Masdar, dkk, *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik* (Yogyakarta: LkiS, 1999), 9.

mengungkapkan pemikiran seseorang atau pandangan kelompok orang adalah dengan menggunakan penelitian secara kualitatif.¹³ Taylor (1975:5) mendefinisikan, metodologi kualitatif sebagai prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁴

2. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian non-empirik.¹⁵ yang menggunakan metode *Library research* (Penelitian kepustakaan). Oleh karena itu sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis baik berupa bahasa Indonesia yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini maupun dengan yang lainnya.

3. Sumber data

Kajian dalam penelitian ini bersifat kepustakaan (*Library research*), karena itu data-data yang akan dihimpun adalah data-data kepustakaan yang relevan dengan obyek studi ini. Adapun sumber data perlu dibedakan antara sumber primer dan sekunder.

¹³Noeng Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakesarasin, 1994), 94.

¹⁴Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 62.

¹⁵Penelitian non-empirik yakni penelitian terhadap konsep-konsep, pemikiran-pemikiran, tesa-tesa filsafat, pandangan hidup, prinsip-prinsip hidup yang diungkapkan seseorang (Lisan atau tertulis) atau lazim disebut penelitian literer. Lihat Tim Penyusun Panduan Skripsi, *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin* (Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 2002), 8.

- i. *Islam on Leadership*, Ahmadi Sofyan, Jakarta: Lintas Pustaka, 2005.
- j. *Kamus Ilmiah Populer*, Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, Surabaya: Arkola, 1994.
- k. *Kamus Bahasa Indonesia*, Teguh Wibawa dan Suyoto, Surabaya: Anugerah, t.t.
- l. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Noeng Muhadjir, Yogyakarta: Rakesarasin, 1994.
- m. *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin*, Tim Penyusun Panduan Skripsi, Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 2002.
- n. *Metode dan Analisis Penelitian, Jilid 2*, karya Michael H. Walizer dan Paul L. Wienir terj. Arief Sukadi Sadiman, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 1991.
- o. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Sudarto, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Data yang sudah terkumpul, kemudian diseleksi untuk menentukan apakah data tersebut relevan atau tidak dengan fokus penelitian yang ditulis. Sehingga hanya data yang dianggap relevan saja yang kemudian dijadikan sebagai sumber data dalam penulisan skripsi ini.

4. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara menelusuri dan mengkaji sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam skripsi ini adalah karya-karya Imam al-Ghazali yang berupa buku maupun artikel-artikel atau karya tulis lain yang beredar di media, baik yang sudah diterjemahkan maupun belum. Dalam hal ini sumber data primernya adalah *al-Iqtishad fi'al-Iqtiqad* dan *Nasihat Bagi Penguasa* Sedangkan yang dimaksud sumber data sekunder adalah buku-buku dan tulisan yang mendukung pendalaman analisa dan berkenaan dengan pembahasan tersebut. Sumber data sekunder berupa buku-buku atau tulisan yang berkaitan dengan pemikiran al-Ghazali khususnya tentang kepala negara. Dalam hal ini sumber data primernya adalah *Pemikiran Liberal di Dunia Arab, Legitimasi Negara Islam (Problem Otoritas Syariah dan Politik Penguasa)* dan *Islam dan Tata Negara (Ajaran Sejarah dan Pemikiran)*.

5. Analisis data

Berpijak pada hasil data dari buku-buku yang mendukung, maka analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis isi (*Content Analysis*). Analisis isi adalah setiap prosedur sistematis yang dirancang untuk mengkaji isi informasi terekam.¹⁶ Analisis isi dimaksudkan melakukan

¹⁶Michael H. Walizer dan Paul L. Wienir, *Metode dan Analisis Penelitian*, Jilid 2, terj. Arief Sukadi Sadiman (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 1991), 48.

pandangan Albert Hourani dan al-Ghazali dalam pandangan Manouchehr Paydar.

Bab lima berisi penutup yaitu kesimpulan dan saran.

Menurut Ibnu Taimiyah bahwa kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan secara sempurna kecuali dengan bermasyarakat. Untuk mengaturnya tidak bisa tidak memerlukan pemimpin. Dalam sumber lain dia juga menjelaskan bahwa, untuk mewujudkan kesejahteraan umat dunia dan akhirat dan mencegah perbuatan jahat, memerlukan kerjasama dan tolong-menolong, dan untuk mewujudkannya memerlukan seorang pemimpin dan mereka harus mamatuhinya. Pentingnya kepemimpinan bagi masyarakat, dia didasarkan kepada karakteristik ajaran Islam. Di sini yang dimaksud karakteristik ajaran Islam adalah agama yang memiliki seperangkat hukum, perintah dan larangan. Allah memerintahkan manusia supaya melaksanakan amar makruf nahi mungkar, jihad, keadilan, ibadah haji, bermasyarakat yang teratur, menolong orang yang teraniaya, dan melaksanakan hukuman. Semuanya tidak bisa dilaksanakan kecuali adanya kekuasaan dan pemimpin. Dimana kewajiban mengatur orang banyak termasuk kewajiban agama, bahwa agama tidak akan tegak kecuali ada kepala negara.³

Sedangkan al-Mawardi mengatakan bahwa keberadaan pemimpin hukumnya wajib berdasarkan akal, sebab watak orang-orang yang berakal mempunyai kecenderungan untuk tunduk kepada pemimpin yang melindungi mereka dari ketidakadilan, memutuskan konflik dan permusuhan yang terjadi di antara mereka. Tanpa pemimpin manusia dalam keadaan kacau, dan menjadi

³J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyash: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 240-241.

manusia-manusia yang tidak diperhitungkan bangsa lain.⁴ Yang dimaksud al-Mawardi seorang pemimpin adalah khalifah, sultan atau kepala negara, dan dengan demikian Mawardi memberikan juga baju agama kepada kepala negara disamping baju politik. Menurutnya, Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti Nabi, untuk mengamankan agama, dengan disertai mandat politik, dengan demikian seorang kepala negara di satu pihak adalah pemimpin agama, dan di lain pihak pemimpin politik.

Sementara itu Ibnu Khaldun berpendapat bahwa setelah organisasi kemasyarakatan terbentuk dan peradaban merupakan suatu kenyataan di dunia ini, maka masyarakat membutuhkan seseorang yang dengan pengaruhnya dapat bertindak sebagai penengah dan pemisah antara para anggota masyarakat. Adapun yang dapat bertindak sebagai penengah dan pemisah itu haruslah dari seorang masyarakat itu sendiri. Dia harus berpengaruh kuat atas anggota-anggota masyarakat, harus mempunyai kekuasaan dan otoritas atas mereka, dan dengan demikian tidak ada seorang pun di antara anggota masyarakat dapat mengganggu atau menyerang sesama anggota masyarakat yang lain. Tokoh yang mempunyai kekuasaan dan wibawa yang memungkinkannya bertindak sebagai penengah, pemisah dan sekaligus hakim itu adalah kepala negara atau raja.⁵

⁴Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* (Jakarta: Darul Falah, 2006), 1.

⁵Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1990), 100.

bercita-cita besar yang bisa diperoleh melalui pendidikan dan akhlak; 3) berpandangan kokoh yang dapat diperoleh dengan meneliti dan mempelajari kehidupan orang terdahulu dan pengalaman hidup mereka; 4) tangguh dalam menghadapi kesukaran dengan keberanian dan kekuatan; 5) memiliki harta yang banyak yang dapat diperoleh melalui memakmurkan negara dan pemeratakan keadilan; 6) memiliki pembantu-pembantu yang berloyalitas tinggi, untuk itu ia harus bersikap lemah lembut dan hormat kepada mereka.⁸ Selain syarat tersebut dia juga mensyaratkan kepala negara harus pandai membagi waktu antara kepentingan pribadi (seperti mendekatkan diri kepada Allah SWT) dan perhatian kepada urusan rakyat, tidak gembira apabila dipuji dan tidak sedih apabila dicaci, dapat menerima kritik dari rakyat, dan dapat menegakkan keadilan dan kebenaran.⁹

Al-Mawardi mensyaratkan seorang yang menjadi kepala negara yaitu; 1) adil dengan syarat-syarat yang universal; 2) ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum; 3) sehat inderawi (telinga, mata dan mulut) yang dengannya dia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya; 4) sehat organ tubuh dan cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat; 5) wawasan yang membuat memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan; 6) berani, dan kesatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara dan melawan musuh; 7) nasab yaitu berasal dari

⁸Ahmad Sukardja, "*Fiqih Siyasah*", *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* (T.t.: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.), 213.

⁹J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran...*, 255.

Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan *ijma'* para ulama.¹⁰ Pada syarat yang terakhir al-Mawardi berdasarkan pada *nash* dan *ijma* yang terjadi pada pertemuan Tsaqifah Bani Sa'idah yang terakhir dengan terpilihnya Abu Bakar secara *ijma*.

Sedangkan Farabi mengatakan bahwa syarat kepala negara itu harus seorang pemimpin yang arif dan bijaksana, yang memiliki dua belas kualitas luhur yang sebagian telah ada pada pemimpin itu sewaktu lahir. Adapun dua kualitas luhur itu ialah; 1) lengkap anggota badannya; 2) baik daya pemahamannya; 3) tinggi intelektualitasnya; 4) pandai mengemukakan pendapatnya dan mudah dimengerti uraiannya; 5) pencinta pendidikan dan gemar mengajar; 6) tidak rakus dalam hal makanan, minuman dan wanita; 7) pencinta kejujuran dan pembenci kebohongan; 8) berjiwa besar dan berbudi luhur; 9) tidak memandang penting kekayaan dan kesenangan-kesenangan duniawi yang lain; 10) pencinta keadilan dan pembenci perbuatan zalim; 11) tanggap dan tidak sukar diajak menegakkan keadilan dan sulit untuk melakukan atau menyetujui tindakan keji dan kotor; 12) kuat pendirian terhadap hal-hal yang menurutnya harus dikerjakan, penuh keberanian, bukan penakut dan tidak berjiwa lemah atau kerdil.¹¹

¹⁰Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* (Jakarta: Darul Falah, 2006), 3-4.

¹¹Munawir Sjadzali, *Islan dan Tata Negara...*, 56.

suatu masa. Maka persyaratan itu dia pahami secara simbolis, artinya kepemimpinan umat Islam bukan hak monopoli Quraisy.

Selain tokoh-tokoh diatas, ternyata Ibnu Taimiyah juga memiliki syarat kepala negara sebagai berikut; bahwa yang pantas menjabat kepala pemerintahan adalah orang yang memiliki kualifikasi kekuatan dan integritas. Kepala pemerintahan adalah orang yang bekerja paling giat, kuat, dan dipercaya (amanah). Kekuatan dalam kepemimpinan harus sesuai dengan bidangnya. Untuk menjadi pimpinan perang, misalnya, dibutuhkan kekuatan, keberanian hati, dan kemahiran melakukan siasat. Demikian pula, kepala pemerintahan harus menjatuhkan hukum diantara manusia sesuai dengan keadilan yang ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah, dan mampu menjalankan hukum itu. Sedangkan amanah diartikan sebagai takut kepada Allah SWT dan menghilangkan rasa takut sesama manusia. Ibnu Taimiyah mengakui, sulit dijumpai kekuasaan dan amanah sekaligus dalam diri seseorang. Oleh karena itu, untuk menempatkan orang dalam jabatan pimpinan, harus ada kesesuaian antara kemampuannya dan kedudukannya itu. Apabila ditemui dua orang, salah satu di antaranya memiliki integritas lebih besar dan yang lain memiliki kekuatan yang lebih menonjol, maka yang diutamakan adalah orang yang lebih bermanfaat bagi bidang jabatannya itu dan lebih sedikit resikonya. Ibnu Taimiyah tidak mensyaratkan bahwa calon kepala negara adalah harus berasal dari Quraisy, sebagaimana yang diterapkan para



Disamping itu, juga tidak mungkin syariat Islam terlaksana dengan baik jika kepala negara itu seorang budak sebab seorang budak tidak memiliki kemerdekaan pribadi. Dia adalah milik tuannya sehingga tidak memiliki wewenang untuk mengatur bahkan terhadap dirinya sendiri. Karena itu dia tidak layak untuk mengurus orang lain, apalagi menjadi penguasa atas manusia. Kaum ulama terdahulu secara tegas menolak perempuan sebagai kepala negara. Mereka mendasarkan pada Hadits yang artinya *"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan"*.¹⁵

Kualifikasi dewasa dan berakal merupakan sesuatu yang tidak boleh tidak dalam setiap aktifitas manusia yang didalamnya ada unsur pelaksanaan syariat Islam dan pertanggungjawaban. Dan kepala negara itu diangkat untuk melaksanakan syariat Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat, dengan konsekuensi mempertanggungjawaban aktivitasnya kepada Allah dan kepada umat. Dengan demikian, orang yang belum dewasa dan tidak berakal tidak dapat menjadi kepala negara.¹⁶

2. Al-adalah, memiliki akhlaq terpuji, dalam arti mampu menjalankan kewajiban agama dan menjahui kemungkaran dan kemaksiatan.

¹⁵*Ibid.*, 264.

¹⁶*Ibid.*, 265.

5. Integritas pribadi yang tanggu dan memiliki keberanian.

Seorang kepala negara harus *al-adalah* dan *wara*, dan sifat ini harus dimiliki secara konsisten atau *istiqomah* sebelum menjabat dan selagi menjabat kepala negara sehingga ia memiliki ketahanan moral yang prima dan tidak mudah tergoda untuk melakukan perbuatan yang menyimpang, mampu mengendalikan emosi, memiliki pendirian yang teguh, bertindak adil tanpa pilih kasih dalam menetapkan hukuman, dan keberanian ketika dalam peperangan atau dalam membela orang yang dizalimi atau dalam melenyapkan kezaliman.¹⁹

6. Kesempurnaan secara fisik, dalam arti tidak cacat.

Tugas dan pekerjaan kepala negara itu sangat berat baik dari segi fisik maupun mental. Oleh karena itu disyaratkan kepala negara itu memiliki kesempurnaan fisik sehingga pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan yang sangat berat itu dapat berjalan dengan baik dan tanpa hambatan. Dapat saja terjadi orang-orang yang memiliki cacat namun memiliki kelebihan dalam mental dan intelektual. Akan tetapi sebagai persyaratan umum, tentu harus diupayakan agar calon kepala negara itu sempurna baik dari segi fisik maupun mental intelektual sehingga pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan yang berat itu dapat berjalan dengan baik dan tanpa hambatan serta lebih berwibawa.²⁰

¹⁹*Ibid.*, 268.

²⁰*Ibid.*, 268-269.

dengan baik, dan melaksanakan syariat yang dibebankan kepadanya. Singkatnya segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum harus sesuai dengan syariat. Dan pemerintahan bertujuan melaksanakan undang-undang dan peraturan, melaksanakan hukuman bagi pelanggar hukum, mengatur militer, mengelola pajak dan mengurus lembaga perkawinan.²³

Al-Mawardi mengajukan sepuluh tugas yang harus dilakukan seorang kepala negara adalah sebagai berikut;²⁴

1. Mempertahankan dan memelihara agama menurut prinsip-prinsipnya yang ditetapkan dan apa yang menjadi *ijma'* oleh salaf (generasi pertama umat Islam).
2. Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan menghentikan perseteruan di antara dua pihak yang berselisih, agar keadilan menyebar secara merata, kemudian orang tirani tidak sewenang-wenang, dan orang teraniaya tidak merasa lemah.
3. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja, dan berpergian ke tempat manapun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.
4. Menegakkan supremasi hukum untuk melindungi larangan-larangan Allah dari upaya pelanggaran terhadapnya, dan melindungi hak-hak

²³J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah...*, 260.

²⁴Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam...*, 24.

hambah-hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.

5. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan celah untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan, atau menumpahkan darah orang muslim, atau orang berdamai dengan orang Muslim.
6. Jihad terhadap orang-orang yang menentang Islam setelah adanya dakwah agar mereka mengakui eksistensi Islam.²⁵
7. Mengambil *fai* (harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan syariat secara tekstual atau *ijtihad* tanpa rasa takut dan paksa.²⁶
8. Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam *Baitul Mal* (kas negara) tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkannya tepat pada waktunya; tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya.²⁷
9. Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang ahli, dan keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur.²⁸

²⁵J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa*..., 260.

²⁶Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam*..., 24.

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

10. Terjun langsung menangani segala persoalan, pemerintah dan kepala negara harus langsung menanganinya dan meneliti keadaan yang sebenarnya.

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah tugas kepala negara adalah untuk melaksanakan syariat Islam demi terwujudnya kesejahteraan umat, lahir dan batin, serta tegaknya keadilan dan aman dalam masyarakat.

D. Pengangkatan Kepala Negara

Pengangkatan kepala negara dengan sistem pemilihan merupakan materi bahasan para juris sunni. Dalam hal ini al-Baqillani berpendapat bahwa sistem pemilihan harus dilakukan melalui orang-orang tertentu yang termasuk golongan orang-orang yang dapat dipercaya. Mereka adalah orang *ahl hilli wa al aqd* (mereka yang berwenang mengikat dan melepaskan). Menurutny pemilihan sah sekalipun dilakukan oleh seorang dari *ahl al-halli wa al aqd*, dia menetapkan setelah kepala negara terpilih, kaum muslimin harus hadir memberikan baiat kepadanya dan memberitahukan kepada rakyat banyak.²⁹

Sedangkan menurut al-Baghdadi bahwa pengangkatan kepala negara harus dibaiat oleh para pemilih sebagai bukti terjadinya kontrak di antara dua pihak. Tapi dia tidak menjelaskan apakah baiat para pemilih itu secara perwakilan dan

²⁹J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa...*, 242.

apakah perlu baiat umum. Dia juga berpendapat bahwa pengangkatan kepala negara secara wasiat adalah sah.³⁰

Berbeda dari tokoh-tokoh lain Ibnu Abi Rabi' tidak berbicara tentang sistem pengangkatan kepala negara. Diamnya ini bisa diartikan sebagai penerimaan terhadap sistem yang berlaku pada masanya. Suksesi kepemimpinan dalam tubuh pemerintahan dinasti Abbasiyah berlangsung secara turun-temurun.³¹

Lebih jauh lagi, al-Mawardi berpendapat bahwa *pertama*, dengan cara pemilihan oleh *ahl al-aqd wa al halli* (mereka yang berwenang mengikat dan melepaskan) yakni para ulama, cendekiawan dan pemuka masyarakat atau disebut juga *al-ikhtiyar*. *Kedua*, cara penunjukan atau wasiat oleh kepala negara yang berkuasa.³²

Pendapat al-Mawardi di atas menunjukkan bahwa proses pengangkatan kepala negara merupakan persetujuan dua belah pihak; antara pemilih dan yang dipilih sebagai satu hubungan dua pihak dalam mengadakan perjanjian atas dasar sukarela. Konsekuensinya kedua belah pihak mempunyai kewajiban dan hak secara timbal balik.

³⁰*Ibid.*, 244.

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*, 245.

Sedangkan menurut al-Mawardi, menyebabkan rakyat wajib mentaati dan membelanya selama tidak berubah keadannya. Yang dimaksud dengan berubah keadannya adalah kepala negara yang cacat keadilannya, dan sesuatu menimpa fisiknya sehingga tidak mampu menjalankan pemerintahan. Kepala negara yang cacat keadilannya karena ia berbuat salah dan fasiq, keluar dari yang benar, perbuatan dan keyakinannya bercampur dengan hal-hal tercela dan mungkar lantaran menurutkan hawa nafsu. Sedangkan sesuatu yang menimpa fisiknya dan membuatnya tidak mampu lagi menjalankan roda pemerintahan, adalah; 1) kehilangan panca indera; 2) kehilangan organ-organ tubuh lainnya; 3) kehilangan kebebasan untuk bertindak, karena menjadi tawanan pembantu-pembantunya atau menjadi tawanan musuh.³⁶

³⁶*Ibid.*

BAB III

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN AL-GHAZALI TENTANG KEPALA NEGARA

Pada bab III ini penulis akan membahas riwayat hidup dan pendidikan Imam al-Ghazali, kondisi sosial pada masa dia hidup, karir dan karya-karyanya. Bab ini juga akan mengupas pemikiran al-Ghazali tentang kepala negara. Pembahasan ini terdiri dari kepemimpinan negara, syarat kepala negara, tugas kepala negara, pengangkatan dan pemberhentian kepala negara. Disamping itu juga penulis membahas dalam sub bab terakhir tentang keberanian al-Ghazali dalam mengkritik kepala negara dengan beberapa metode.

A. Riwayat Hidup dan Pendidikan Al-Ghazali

Al-Ghazali nama aslinya adalah al-Imam al-Jalil Muhamad bin Muhamad bin Ahmad al-Thusi Abu Hamid al-Ghazali. Dilahirkan di Thus, salah satu kota di Khurasan pada tahun 450 H (1058), dan wafat juga di Thus pada tahun 505 H atau 1111 M.¹ Reublik Islam Iran, dia adalah keturunan Persia asli.

Orang tuanya gemar mempelajari ilmu tasawuf, karena itu dia (orang tuanya) hanya mau makan dari hasil usaha tangannya sendiri dari menenun wol.

Dia juga terkenal pencinta ilmu dan selalu berdoa agar anaknya kelak menjadi

¹Tim Nuansa, *Dua tokoh Besar Agama Islam: Imam Al-Ghazzali dan Thaha Hussein* (Bandung: Nuansa, 2008), 26.

mazhab Syafi'i inilah al-Ghazali memperoleh ilmu pengetahuan, seperti ilmu fiqih, ilmu kalam dan ilmu logika. Karena kecerdasan yang dimilikinya, semua ilmu tersebut dapat dikuasai dalam waktu singkat. Dengan demikian semakin lengkaplah ilmu yang diterimanya selama di Naisabur.⁷ Kehausan al-Ghazali akan ilmu pengetahuan sudah tampak sejak intelektualnya mulai berkembang. Dia cenderung untuk mengetahui, memahami, dan mendalami masalah-masalah yang hakiki. Disini al-Ghazali memainkan peranan besar dalam pengembangan Universitas itu. Dengan perkembangan negara, para lulusan Madrasah secara relative diberi jaminan duduk di Pos-pos tertentu, khususnya di bidang *syari'ah*.

B. Kondisi Sosial dan Perjalanan Karir Al-Ghazali

Dua puluh tahun setelah berdirinya kerajaan dinasti Saljuk, al-Ghazali lahir di Thus. Sejak dia muda, dia menyaksikan pertumbuhan awal dinasti itu yang gagap gempita, di bawah pemerintahan Tughrul-Beg, Alp-Arselan dan Maliksyah, yang berhasil mengalahkan Mas'ud dari Gaznah (Pada 1040). Para tentara Saljuk kemudian melakukan ekspansi luar biasa ke selatan menuju Khurasan, ke daerah Stupa kering di bagian Utara, hingga Palestina, Syiria dan Asia kecil.⁸

⁷Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya...*, 156.

⁸Al-Ghazali, *Nasihat Bagi Penguasa...*, 10.

Pada zaman al-Ghazali kekuasaan kepala negara hampir semata-mata terbatas pada bidang spiritual, sedang dengan kekuasaan politik yang sebenarnya berada pada penguasa-penguasa lokal yang bertebaran di wilayah dunia Islam apakah mereka itu bergelar sultan, raja atau amir. Pada waktu yang sama berbagai mazhab atau aliran, baik akidah seperti Asy'ariyah, Mu'tazilah serta Syi'ah, maupun dalam bidang hukum seperti Maliki, Hanafi, Syafi'ih dan Hambali. Dan pada waktu itu para penguasa politik yang saling berebut kekuasaan dan wilayah mencari dukungan dari kelompok agama-agama tertentu. Sebaliknya juga aliran-aliran agama dalam usahanya mempertahankan dan memperluas pengaruh dan wilayah masing-masing, mencari dukungan dari penguasa-penguasa politik. Dengan demikian terjadilah persekutuan antara penguasa-penguasa politik dan mazhab-mazhab agama.⁹

Di bawah Tughrul Beg, kekacauan masyarakat dan pejabat negara diakhiri dan mendirikan perubahan penting terutama dalam peningkatan pengetahuan masyarakat. Yang utama adalah mereka berjasa mendirikan perguruan Nizamiyah.

Di perguruan Nizamiyah inilah karir keilmuan al-Ghazali memuncak, dan pada tahun 1091 M/ 484 H, dalam usia 25 tahun al-Ghazali diangkat menjadi dosen pada Universitas Nizhamiyah, Baghdad. Atas prestasinya yang kian meningkat, pada usia 34 tahun al-Ghazali diangkat menjadi pimpinan (Rektor)

⁹Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1990), 72.

Sementara itu Wazir Fakhru'l muluk anaknya Nizham al-Muluk datang untuk menemuinya dan mendesaknya dengan segala cara agar ia mau menerima jabatan sebagai Guru Besar pada Universitas Nizamiyah di Nisyapur. Penting untuk disebutkan di sini bahwa terdapat Universitas Nizamiyah yang didirikan Nizamul al-Mulk, yang satu berada di Baghdad dan lainnya di Nisyapur. Al-Ghazali menyetujui dan dia pun kembali ke Nisyapur untuk melanjutkan kegiatannya mengajar di Universitas Nizamiyah dan kehidupan masyarakat.¹⁵

Tetapi setelah mengajar untuk beberapa waktu, al-Ghazali berhenti dari jabatannya dan kembali untuk menghabiskan hari-hari terakhirnya di kota asalnya. Dan dia mengisi pekerjaannya dengan membuat khaligrafi. Penting untuk dijelaskan bahwa khaligrafi punya nilai khusus pada masa itu sebab pencetakan buku-buku tidak begitu umum dilakukan kerajaan Saljuk. Para cendekiawan, penyair dan penulis harus bergantung pada manuskrip karya-karya klasik dan tulisan mereka sendiri. Al-Ghazali merasa tertarik dan punya bakat khusus dalam hal pembuatannya sekaligus merupakan sumber utama pendapatannya pada akhir masa hidupnya.

Dia membangun Madrasah Khan-Kah untuk mengajar tasawuf. Usaha ini dia lakukan sampai dia wafat pada tanggal 14 Jumadil akhir 505 H. Bertepatan dengan tanggal 18 Desember 1111 M. Dia menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam usia 55 tahun.¹⁶

¹⁵Abdul Qayum, *Surat-Surat...*, 10.

¹⁶Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya...*, 158.

Al-Ghazali diberi kehormatan dengan *Hujjat al-Islam* (argumentasi Islam) karena pembelaannya yang mengagumkan terhadap agama Islam. Karenanya statemen yang dikemukakan sarjana-sarjana Eropa (juga sebagian orang Islam) bahwa dia adalah Muslim terbesar sesudah Muhammad SAW. Memperkuat kebesaran nama yang disandangnya.

Sedangkan dari ulama sezamannya, yaitu Abu Hasan Abdul Ghafir al-Farisi, beliau mengatakan, "Imam al-Ghazali adalah *Hujjatul Islam* bagi kaum Muslimin, imam dari para imam agama, pribadi yang tidak pernah dilihat oleh mata diri tokoh-tokoh selainya, baik lisannya, ucapannya, kecerdasan maupun tabiatnya." Dan al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam kitab *al-Bidayah wa An-Nihayah*, memberikan komentar, "al-Ghazali sangat jenius dalam berbagai disiplin ilmu, dan memiliki karya yang tak terhitung. Dia termasuk orang yang paling cerdas dikalangan cendekiawan dalam setiap membahas sebuah masalah. Al-Ghazali telah menjadi seorang tuan dikala mudanya, sehingga dia diangkat sebagai dosen di Universitas Nizhamiyah, Baghdad.¹⁷

C. Karya-Karya

Sosok al-Ghazali mempunyai keistimewaan yang luar biasa, ia seorang ulama, pendidik, ahli pikir dalam ilmunya dan pengarang yang produktif. Pemaparannya sangat bagus, gaya bahasa menarik, dalil yang disajikannya sangat

¹⁷Yusuf Qardhawi, *Al-Ghazali Antara Pro dan Kontra* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1996), 40.

kuat sehingga setiap ilmu yang dituliskannya dapat dijadikan *hujjah*. Karya tulisnya meliputi berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Buah tangannya ini tidak sedikit dialih bahasakan orang ke dalam berbagai bahasa di Eropa. Dan karya-karyanya sebagai berikut;

1. *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad.*
2. *Iljamul al-Awwam 'an Ilmi al-Kalam.*
3. *Asrarul al-Mu'ammalatiddin.*
4. *Asrarul al-Anwari al-Ilahiyah.*
5. *Akhlaqu al-Abrar.*
6. *Asrarul al-Huruf wa al-Kalimat.*
7. *Ayyuha al-Walad.*
8. *Bidayatu al-Hidayah.*
9. *Al-Basith Fii Furuu'i al-Madzab.*
10. *Bayanu al-Qaulani li as-Syafi'ie.*
11. *Badaa'i ash-Shani.*
12. *Tanbihu al-Ghafilin.*
13. *Talbisul al-Iblis.*
14. *Tahafut al-Falasifah.*
15. *At-Ta'liqul fi Furuu'i al-Madzab.*
16. *Tahsinul al-Ma'khadz.*
17. *Tahsinul al-Adillah.*
18. *Tafsirul al-Qur'an al-Karim.*

19. *At-Tafriqu baina al-Iman wa az-Zindiqaat.*
20. *Jawahiru al-Qur'an.*
21. *Khujjatu al-Khaq.*
22. *Khaqiqatu ar-Ruh.*
23. *Khaqiqatu al-Qaulani.*
24. *Khulashatu ar-Rasaa'il.*
25. *Rasailu al-Aqthab.*
26. *Risalatu ath-Thair.*
27. *Ar-Raddu 'ala man Tha'ana.*
28. *Risalatu al-Laduniyah.*
29. *Risalatu al-Qudsiyah.*
30. *Aqidatu al-Mishbakh.*
31. *Ajaa ibi Shan'illah.*
32. *Unquudu al-Mukhtashar.*
33. *Ghayatu al-Ghaur fi Massa ili ad-Daur.*
34. *Ghauruddaur fi Mas alati al-Madzkur.*
35. *Fatikhatu al-Ulum.*
36. *Fawaatikhussuuri wa al-Farqu baian ash-Shali waghairu ash-Shaalikh.*
37. *Al-Qanunu al-Kalbiyu.*
38. *Al-Qanunu ar-Rasul.*
39. *Al-Qurbatu ila Allah.*
40. *Qawa'idu al-'Aqaaid.*

41. *Al-Qaulul Jamil fi ar-Raddi 'ala man Ghayyara al-Injil.*
42. *Kimia' is Sa'adah.*
43. *Kasyfu 'Ulumi al-Akhirah.*
44. *Al-Lababu al-Muntakhili fi al-Jadal.*
45. *Al-Mustashfa fi Ilm al-Ushul.*
46. *Al-Mankhul fi al-Ushul.*
47. *Al-Ma'khadzu fi al-Khilafiyat.*
48. *Al-Mabadi wa al-Ghayat.*
49. *Al-Majlisu al-Ghazali.*
50. *Al-Maqashidu al-Falasisfah.*
51. *Al-Munqidz min al-Dhalal.*
52. *Mi'yaru al-'Ilmi.*
53. *Makhallu an-Nadhar.*
54. *Minhaju al-Abidin.*
55. *Misykatu al-Arwar.*
56. *Mizanu al-Amal.*
57. *Mawahimu al-Bhatiniyah.*
58. *Minhaju al-A'laa.*
59. *Mi'raju as-Shalikhin.*
60. *Al-Maknun as-Salatin.*
61. *Al-Wajizu fi al-Furu'.*
62. *Al-Wasithu fi al-Furu'i al-Wasith.*

8. Sehat panca inderanya seperti; pengucapannya, penglihatan dan pendengarannya.
9. Adil.
10. Keturunan Quraisy. Persyaratan yang keempat ini didapatkan dari sabda Nabi SAW, "Para pemimpin dari suku Quraisy."
11. Pengangkatan atau pemasrahan kekuasaan dari yang lain (hidayah), Yaitu bahwa dia dipasrahi kekuasaan oleh seseorang untuk menjadi pemimpin. dengan hal itu dia menjadi orang yang ditaati.
12. Punya kekuasaan nyata adalah kepala negara memiliki perangkat pemerintahan termasuk militer dan kepolisian yang mampu membasmi pembangkang dan pemberontakan sebelum tersebar kejahatan mereka.

Dari syarat-syarat kepala negara yang disebutkan al-Ghazali diatas, sebagaimana para ulama sunni juga mensyaratkan hal tersebut, akan tetapi di sini al-Ghazali juga berbeda dengan ulama sunni yang menyangkut persyaratan ilmu. Al-Ghazali tidak sependapat dengan kesepakatan para ulama bahwa seorang tidak boleh menjadi kepala negara kecuali memiliki beberapa ilmu. Bagi al-Ghazali persyaratan tersebut tidak diharuskan bagi calon kepala negara tapi cukup kiranya kalau kepala negara memiliki budi pekerti atau akhlak yang luhur atau berbudi pekerti atau *wara*. Sedangkan dalam masalah hukum dan syariat Islam, dia bisa mengembalikannya kepada para ulama dan kaum cendekiawan yang terpandai pada zamannya, dan dalam mengambil keputusan, memdasarkan dan saran mereka.

3. Tugas Kepala Negara.

Tugas dan tujuan lembaga pemerintahan dan pandangan al-Ghazali adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syari'at, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Ia juga berfungsi sebagai lambang kesatuan umat Islam demi kelangsungan sejarah umat Islam.

Al-Ghazali menyebutkan tugas-tugas kepala negara antara lain;²⁶

a. Tanggung jawab terhadap kekuasaan kepala negara.

Kepala negara harus memahami batas dan kadar kekuasaan, serta menyadari kemungkinan buruk kekuasaan itu. Sebab kekuasaan adalah satu anugerah Allah. Siapa menegakkannya dengan baik, akan memperoleh kebahagiaan tertinggi. Sebaliknya, bila tidak dapat menjalankannya dengan baik dan penuh amanat, ia akan memperoleh siksa, sebagaimana orang yang kufur kepada Allah.

b. Menerima pesan ulama.²⁷

Seorang kepala negara mesti senang bergaul dengan para ulama dan menerima nasihat mereka. Tapi ia perlu waspada akan ulama yang hanya menginginkan kekayaan duniawi. Mereka menyanjung, membujuk dan merayu kepala negara. Mereka sengaja membuat kepala negara senang, hanya karena mengharapkan kekayaan kepala negara, yang hina tak bernilai.

²⁶Imam al-Ghazali, *Nasihat Bagi Penguasa...*, 152.

²⁷*Ibid.*, 157.

- b. Pemasrahan kekuasaan, jika itu harus didapatkan dari mayoritas orang, maka disyaratkan untuk mengumpulkan mereka, meminta janji setia dan persetujuan mereka sehingga ketaatan (rakyat) menjadi sempurna.

Dari uraian kedua poin tersebut, menurut penulis melihat lebih lanjut dimana poin *pertama*, al-Ghazali berpendapat pengangkatan kepala negara berdasarkan penunjukan oleh pemimpin satu periode yang artinya kepala negara mengangkat putranya atau orang lain untuk berkuasa. Poin *kedua*, al-Ghazali menjelaskan bahwa pengangkatan kepala negara dilakukan dengan jalan pemasrahan atau pelimpahan kekuasaan artinya penunjukan kepala negara yang diperkuat dengan sumpah setia (*baiat*) maksudnya penunjukan Abu Bakar Asy-Shiddiq kepada Umar bin Khatab dengan melalui janji setia (*baiat*) dan persetujuan rakyat.

Menurut penulis jika pengangkatan melalui sistem penunjukan maka musyawarah tidak berfungsi dengan baik padahal suatu yang melalui kesepakatan itu lebih baik. Dengan demikian penulis lebih setuju dengan pengangkatan kepala negara dengan jalan pemilihan. Dengan jalan pemilihan ini dapat menjadi acuan paling baik bagi lahirnya seorang kepala negara secara demokratis, mekanisme demokratis yang melibatkan seluruh masyarakat yang mempunyai hak memilih akan berlaku adil berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan keadilan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional demi kemaslahatan umat. Fungsi kepala negara dalam pemerintahan adalah untuk mewujudkan ajaran Islam dan memberikan sebanyak mungkin manfaat kepada

umat secara adil, termasuk kebijakan-kebijakan yang memberikan kesempatan kepada umat melakukan sesuatu yang bermanfaat.

5. Pemberhentian Kepala Negara.

Al-Ghazali berpendapat bahwa melarang umat melakukan pemberontakan terhadap kepala negara³⁸ dan sebagaimana seorang kepala negara tidak dapat diturunkan dari jabatannya. Dengan alasan bahwa kekuasaan seorang kepala negara adalah sakral atau suci mandat dari Allah.

Dalam keterangan lain juga al-Ghazali menegaskan bahwa mematuhi pemerintahan dan memberikan kepada mereka dukungan, loyalitas dan bantuan, meskipun sebagai manusia mereka memang tidak sempurna, adalah perintah agama, yang tidak dapat dikesampingkan oleh siapapun (yang sama-sama manusianya dan tidak sempurna).³⁹

Pemberhentian kepala negara menurut al-Ghazali tidak ada dalam pemikirannya akan tetapi dia berpendapat jika seseorang tidak memenuhi syarat yang ditentukan, tetapi dia mampu menciptakan keamanan baik kehidupan dunia dan akhirat, serta merealisasikan ketentraman dan meleyapkan peperangan, dia tidak berilmu akan tetapi meminta pendapat kepada para ulama dan melaksanakan perkataan mereka, maka dalam hal ini menurut al-Ghazali wajib ditaati dan diterima kepemimpinannya, jika dikhawatirkan terjadi kekacauan dan peperangan jika dia digulingkan.

³⁸*Ibid.*, 192.

³⁹Mudaththir Abdurrahim, "Pemikiran Politik Al-Ghazali: Hakekat dan Relevansinya Masa Kini", ISLAMIA, Vol. V. No.2 (Jakarta: Khairul Bayan Press, 2009), 65.

Dengan demikian karena keadaan darurat menyebabkan diperbolehkannya sesuatu yang terlarang maka kepemimpinannya diterima demi kehidupan rakyat, dan mempertahankan kehidupan mereka. Jika kepemimpinan kepala negara tidak diakui maka akan terjadi kekosongan kekuasaan dan pemerintahan. Urusan pemerintahan di seluruh negeri tidak terlaksana. Semua transaksi dan pernikahan tidak dapat ditetapkan, dan orang-orang terhalang dalam melakukan usaha terkait dengan pemerintahan. Hal ini tidak boleh terjadi. Karena hal itu akan mengacaukan roda kehidupan dan menghancurkan rakyat. Maka bisa disimpulkan bahwa pemberhentian kepala negara tidak ada dalam pemikiran al-Ghazali.

E. Metode Kritik Al-Ghazali Terhadap Kepala Negara

Keberanian al-Ghazali ini sangat menarik, al-Ghazali mengajukan pendapatnya tentang perbaikan politik dalam pemerintahan melalui metode, yaitu: Metode pemutusan hubungan dan metode kritik dengan menulis surat kepada kepala negara.

Al-Ghazali beranggapan bahwa kehancuran rakyat dikarenakan kehancuran raja-raja, kehancuran raja-raja dikarenakan kehancuran para ulama, dan kehancuran ulama dikarenakan kecintaan mereka kepada harta dan kedudukan. Barangsiapa yang dikuasai oleh dunia, maka tidak akan mampu

Al-Ghazali menyaksikan peristiwa ini dari kampung kelahirannya di Thus dimana dia meskipun tidak lagi aktif dalam pemerintahan akan tetapi di memantau pergulatan politik di wilayah tersebut. Sebagai ilmuwan yang memiliki pemikiran dan jiwa yang tajam, al-Ghazali berusaha menempatkan diri sebagai agen perubahan dalam perbaikan pemerintahan. Sebab al-Ghazali melihat, dinasti saljuk ada sisi negatifnya seperti penyalahgunaan wewenang dan ketidaksiplinan moral. Oleh karena itu, al-Ghazali melihat pemerintahan masih dapat dipertahankan dan diperbaiki. Itulah sebabnya dia menulis surat-surat yang berisi nasihat dengan tujuan untuk memperbaiki ilmu masyarakat dan pejabat negara.

Di sini penulis bisa menyimpulkan bahwa al-Ghazali dalam teori kenegaraannya mengutamakan perpaduan moral dengan kekuasaan. Negara dan pemerintahan dipimpin oleh manusia biasa, akan tetapi harus memiliki moral yang baik. Demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan menyeluruh untuk masyarakat.

Pengalaman-pengalaman dalam situasi sosial politik seperti tersebut di atas ditambah dengan corak keilmuan al-Ghazali inilah yang membentuk karakter pemikiran al-Ghazali tentang politik Islam. Al-Ghazali telah menunjukkan sebagai ulama yang memiliki pemikiran cemerlang yang disegani dan diterima oleh para pejabat negara serta para ulama lainnya. Penulis menilai corak pemikiran politiknya sangat benuansa etika dan adab politik. Pemikiran yang cukup menarik adalah dalam teorinya bagaimana cara menjalankan sebuah sistem kenegaraan yang mempertimbangkan moralitas untuk kemaslahatan bersama

dengan kepala negara yang mempunyai integritas tinggi ditopang dengan kekuatan moral yang memenuhi beberapa kriteria yang al-Ghazali idealkan. Pemikiran seperti ini sangat relevan untuk dijadikan referensi bagi para pejabat saat ini.

BAB IV

PANDANGAN CENDEKIAWAN TERHADAP PEMIKIRAN AL-GHAZALI TENTANG KEPALA NEGARA

Bukan suatu hal yang aneh, bila kemudian banyak dari sarjana modern memberikan pendapatnya terhadap al-Ghazali, sebagaimana argumen yang telah diberikan oleh ulama-ulama pendahulunya. Dan setelah mengupas biografi dan pemikiran al-Ghazali dalam bab III yang di dalamnya menguraikan secara menyeluruh pemikiran al-Ghazali tentang kepala negara dan metode kritik al-Ghazali terhadap kepala negara, maka dalam bab IV ini sebagai sedikit pelengkap akan dibahas pandangan cendekiawan terhadap pemikiran al-Ghazali khususnya tentang kepala negara. Diantara cendekiawan-cendekiawan antara lain; Din Syamsuddin, Munawir Sjadzali, Albert Hourani dan Manouchehr Paydar.

A. Al-Ghazali Dalam Pandangan Din Syamsuddin

Din Syamsuddin adalah nama lengkapnya adalah Sirajuddin Syamsuddin, Ketua DPP sementara Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Dia juga seorang politisi dan sekaligus cendekiawan.¹

¹<http://www.TokohIndonesia.Com> (*Ensiklopedi Tokoh Indonesia*), 12 juli 2010.

tersebut. Dengan melihat latar belakang pemikiran al-Ghazali dalam muatan-muatan syarat kepala negara.

Dari semua syarat-syarat kepala negara yang disebutkan para tokoh di atas, dari berbagai syarat tersebut ada kesamaan dan ada perbedaan. Sedangkan menurut penulis syarat-syarat yang disebutkan diatas, ketika melihat sejarah Islam pada kenyataannya selama berabad-abad, kriteria dan standar untuk mengukur kualitas seorang calon kepala negara tidak menjadi subjek intens bagi para pemikir dan teolog muslim meskipun ada perbedaan yang cukup mendasar antara para ahli hukum. Dan menelaah lebih lanjut, pemikiran al-Ghazali diikuti oleh Din Syamsuddin tentang syarat-syarat tersebut. Penulis berpendapat bahwa penulis tidak setuju dengan syarat kepala negara dengan pemasrahan kekuasaan artinya seseorang dipasrahi kekuasaan oleh pemimpin yang lama untuk menjadi kepala negara. Jika hal itu terjadi Disini akan nampak bahwa seorang kepala negara yang lama mempunyai otoritas penuh dalam mengangkat kepala negara sesuai yang dikehendaknya. Proses ini bisa ditakutkan adanya percekcoakan dalam tubuh negara dengan alasan kepala negara punya otoritas penuh dan tidak mengikut sertakan rakyatnya untuk memilih kepala negara bisa mengakibatkan perselisihan. Padahal rakyat juga mempunyai hak memilih dalam suatu lembaga kenegaraan.

Selain syarat-syarat yang disebutkan di atas, ada juga syarat-syarat kepala negara dalam pandangan ulama; seperti yang dewasa, kewaraan, berakal sehat, merdeka, punya kekuasaan yang nyata, ilmu pengetahuan, kemampuan adalah

kelayakan untuk mengatur orang lain dan membawa mereka ke jalan kebaikan, sehat panca indera dan adil.

Disini penulis menambah lagi dengan memiliki kecakapan dan kebijakan dalam masalah-masalah kenegaraan, politik dan administrasi dengan alasan seorang kepala negara itu dipilih dan diangkat untuk bekerja dan tidak sekedar untuk memiliki pengetahuan secara umum akan tetapi dia memiliki kecakapan dibidang pengaturan masyarakat. Dengan memiliki kecakapan dalam urusan negara atau administrasi seorang kepala negara akan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Akan tetapi jika seorang kepala negara tidak mempunyai kriteria hal ini bisa di topang dengan adanya orang-orang yang ahli dalam bidang yang dibutuhkan negara untuk membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan tersebut.

B. Al-Ghazali Dalam Pandangan Munawir Sjadzali

Munawir Sjadzali adalah seorang tokoh intelektual serta diplomat yang menjabat sebagai Menteri Agama sejak Kabinet Pembangunan IV-V (1983-1993) dalam negara Indonesia sendiri. Dalam buku yang judulnya *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Dia menjelaskan para tokoh-tokoh politik Islam dari zaman klasik hingga kotemporer yang dipaparkan dengan masing-masing pemikirannya.

Menurut penulis dari pendapat tentang pemberhentian kepala negara, memperlihatkan kepatuhan kepada penguasa dengan alasan menjaga keberadaan agama. Akan tetapi ada implikasi negatif dan tidak terbayangkan sebelumnya dari kebijakan ini adalah hilangnya kebebasan individu atas beberapa hak asasinya. Jika ada penyimpangan yang dilakukan oleh kepala negara maka kepala negara tersebut harus diberhentikan kalau memang cara ini sudah alternatif terakhir. Bila negara ingin harmonis maka ada pembatasan jabatan kepala negara. Dengan tujuan untuk menciptakan tradisi kepemimpinan yang mapan tapi tetap dinamis hal ini tak lain untuk mengantisipasi munculnya ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Selain itu perlu ada juga mekanisme kontrol terhadap kepala negara serta sistem pertanggungjawaban secara teratur agar kekuasaan menjadi efektif dan fungsional.

Dari sekian banyak pendapat-pendapat cendekiawan antara Munawir Sjadzali, Din Syamsuddin, Albert Hourani dan Manouchehr Paydar. Dari semua pemaparan tokoh-tokoh tersebut, mereka hanya berbicara masalah kepemimpinan negara, syarat dan pemberhentian kepala negara. Mereka tidak menyinggung masalah pengangkatan atau tugas kepala negara. Dan disini Ternyata terlihat jelas bahwa pemikiran al-Ghazali juga menjadi rujukan dalam kajian-kajian mereka. Meskipun kajian-kajian mereka tidak secara menyeluruh membahas sub bahasan tentang kepala negara akan tetapi hal itu tidak menjadi surut bagi penulis. Dengan adanya demikian kita mengetahui sejauh mana para cendekiawan membahas

Sedangkan masalah pemberhentian kepala negara, al-Ghazali berpendapat bahwa melarang umat melakukan pemberontakan terhadap kepala negara dan sebagaimana kepala negara tidak dapat diturunkan dari jabatannya, maka dalam pemikiran al-Ghazali tidak ada pemberhentian kepala negara. Ketika melihat sistem pemerintahan Indonesia bahwa seorang presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya dan pernyataan ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat bahwa presiden dan/ atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

Maka bisa ditarik benang merah bahwa antara pemikiran al-Ghazali dengan keadaan negara Indonesia dalam masalah pemberhentian kepala negara tidak ada relevansinya.

Dengan demikian Sosok cendekiawan al-Ghazali memiliki kepedulian sosial yang tinggi itu, Dia bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap cendekiawan sesudahnya hal ini perlu dicontoh oleh kaum ulama atau ilmuwan, intelektual dan cendekiawan. Hendaknya mereka menyumbangkan pikiran-pikiran secara aktif dalam upaya perbaikan ketidakadilan ekonomi, peningkatan

negara. Sebagaimana pemikirannya tentang kepala negara al-Ghazali juga mempunyai metode kritik terhadap kepala negara dan metode yang digunakan adalah metode memutuskan hubungan dengan kepala negara artinya tidak berkerja sama antara rakyat dan kepala negara dan metode mengirim surat berisi nasehat dengan tujuan untuk perbaikan negara.

Kedua, dalam pandangan Munawir Sjadzali dan Albert Hourani bahwa harus ada kepala negara sebagaimana dengan pendapat al-Ghazali. Din syamsuddin mengikuti pendapat al-Ghazali mengenai syarat-syarat kepala negara dan Manouchehr Paydar tidak mengikuti pendapat al-Ghazali akan tetapi dia mengikuti syarat-syarat dengan kesepakatan ulama. Kemudian Munawir Sjadzali, Albert Hourani dan Monouchehr paydar menyepakati tidak memperbolehkan pemberhentian kepala negara dan Pemikiran-pemikiran al-Ghazali dibuat bahan rujukan dalam kajian cendekiawan.

B. Saran-saran

Hasil dari penelitian ini belum tentu sempurna, akan tetapi setidaknya memberikan kontribusi wacana bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan utamanya tentang politik Islam dan khususnya tentang kepala negara. Pemikiran seperti ini sangat relevan untuk dijadikan referensi bagi para pejabat saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikaji ulang yang tentunya lebih teliti.

Tim Nuansa. *Dua tokoh Besar Agama Islam: Imam Al-Ghazzali dan Thaha Hussein*, Bandung: Nuansa, 2008.

Tim Penyusun Panduan Skripsi. *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin*, Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 2002.

Walizer, Michael H. dan Paul L. Wienir. *Metode dan Analisis Penelitian*, terj. Arief Sukadi Sadiman. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 1991.

Wibawa, Teguh dan Suyoto. *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Anugerah, t.t.

Zar, Sirajuddin. *Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.